

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI
(Studi Kasus di wilayah hukum se-karesidenan Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

BINAR NUGROHO NUR SETYAWAN

C 100 140 244

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali dan Karanganyar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

BINAR NUGROHO NUR SETYAWAN

C 100 140 244

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters 'K' and 'S' followed by a horizontal line.

(Kuswardhani, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali dan Karanganyar)

Oleh :

BINAR NUGROHO NUR SETYAWAN

C 100 140 244

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari : Senin, 30 Juli 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Kuswadhani, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



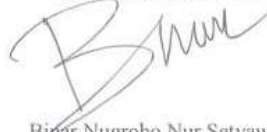
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 juli 2018



Binar Nugroho Nur Setyawan

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI
(Studi Kasus di wilayah hukum se-karesidenan Surakarta)**

Abstrak

Kejahatan terhadap pembuangan bayi merupakan kejahatan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan juga merendahkan derajat manusia, terlebih pelaku pembuangan bayi merupakan anak, maka ini menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Permasalahan yang diteliti yaitu apakah alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuangan bayi, bagaimanakah peraturan hukum pidana terkait anak sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi, bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian penulis yaitu alasan-alasan yang mendasari anak membuang bayi karena factor ekstrinsik dan juga kurangnya pengetahuan mengenai peraturan hukum dan agama tentang pembuangan bayi, peraturan hukum pidana terkait pembuangan bayi diatur di dalam KUHP dan juga diluar KUHP yaitu undang-undang, perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dilakukan melalui proses diversi dan juga peradilan umum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Pembuangan bayi

Abstrack

Crime against infanticide is a crime that damages the values of humanity and also lower the degree of humans, especially the perpetrators of infant disposal is a child, then this becomes a problem that needs to get more attention. The problem under investigation is whether the reasons underlying the perpetrator to perform the act of disposal of baby, how the rules of criminal law related to children as perpetrators of the act of disposal of babies, how the protection of the rights of children as perpetrators of infant disposal in the criminal justice process. The method used by the author in this research is empirical juridical method. The results of the author's research are the reasons underlying the child to throw away the baby due to extrinsic factors and also the lack of knowledge about the law and religion rules about the disposal of infants, the rules of criminal law related to the disposal of infants regulated in the Criminal Code and also outside the Criminal Code namely the law, - the child as the perpetrator pembuangn baby done through the process of diversion and also the general court.

Keywords: *Law Enforcement, Children, Infant Disposal*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak dan kewajiban asasi setiap warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.¹ Perlindungan terhadap bayi di atur sedemikian rupa yang terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang tentang Perkawinan, Undang-undang Tentang Kesehatan. Undang-undang tentang Perlindungan anak dan peraturan-peraturan hukum lainnya.² Akan tetapi dalam kenyataanya perlindungan hukum yang diberikan tersebut tidak memberikan efek takut kepada masyarakat, sekarang ini sering terjadi penemuan bayi yang dibuang oleh orang tuanya.

Seperti kasus pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah, warga menemukan mayat bayi yang dibungkus dengan rok dan dikubur di hutan Ngaren, Juwangi, keadaan bayi tersebut saat ditemukan plasenta masih melekat di tubuh bayi.³ Dan juga kasus yang terjadi di dukuh Kadiloyo Rt 5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangejo, Karanganyar dimana telah ditemukan bayi di dalam tenggok atau bakal di teras belakang rumah. Keadaan bayi saat pertama kali di temukan masih lengkap dengan tali pusarnya, bayi tersebut sengaja di buang oleh orangtunya atau ibunya.⁴

Kejahatan terhadap pembungan bayi merupakan kejahatan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan juga merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang juga memegang peran penting dalam hal terjadinya tindak pidana pembuangan bayi tersebut, oleh karena itu menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan

¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d ke-10, dalam Konvensi Hukum Nasional*, Semarang: Pustaka Megister

² Zulfa Ahmad, 2009, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ISLAMICA, Vol.4 No.1, September 2009, hal.1-2, Diakses pada hari Selasa 20 Maret 2018, Pukul 18:01 WIB.

³ Oriza Vilosa, Polisi Tangkap Pelaku Pembuang Bayi di Hutan Juwangi, www.jatengpos.com/2013/09/penemuan-mayat-boyolali-polisi-tangkap-pelaku-pembuang-bayi-di-hutan-448485, Diakses pada hari Senin 16 April 2018, Pukul 12:00 WIB.

⁴ Wardoyo, 07 Februari 2018, *Geger Temuan Bayi Dalam Tenggok Dibuang di Gondangrejo. Diduga Baru Dilahirkan, Saat DITEMUKAN Tak Henti Meringik...*, <https://joglosemarnews.com/2018/02/geger-temuan-bayi-dalam-tenggok-dibuang-di-gondangrejo-diduga-baru-dilahirkan-saat-ditemukan-tak-henti-meringik/>. Diakses pada hari Selasa 20 Maret 2018, Pukul 19:01 WIB.

atau moralitas.⁵ Perbuatan pembuangan bayi telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh bayi, dengan demikian maka perlu diawasi bagaimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap bayi yang dibuang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuangan bayi (2) Bagaimanakah peraturan hukum pidana terkait anak sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi (3) Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana.

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuangan bayi, (2) Untuk mengetahui peraturan hukum pidana terkait anak sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi, (1) Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris.⁶ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di wilayah hukum Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, Sumber data (1) Data Primer.⁸ (2) Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan Bahan Hukum Sekunder, Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan Studi lapangan dengan melakukan wawancara. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif.⁹

⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 34.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 53.

⁷ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinek Cipta, Hal. 23

⁸ Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, hal. 91

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Alasan-alasan yang Mendasari Pelaku untuk Melakukan Perbuatan Pembuangan Bayi

Terkait dengan alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuatan bayi erat kaitanya dengan motif atau motivasi yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya.¹⁰ Motif dan motivasi di dalam kaitannya pembahasan ini yaitu motif atau motivasi yang mendorong atau mendasari pelaku melakukan perbuatan pembuangan bayi.

3.1.1 Alasan-alasan yang Mendasari Pelaku untuk Melakukan Perbuatan Pembuangan Bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali

Pelaku pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali adalah pasangan kekasih di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) di salah satu SMA di kabupaten Boyolali. Berikut ini alasan-alasan pelaku melakukan pembuangan bayi yaitu sebagai berikut:

- a. Takut apabila diketahui oleh kedua orang tuanya karena telah hamil dan melahirkan

Pelaku yang masih duduk di bangku SMA dan belum menikah menjadi faktor kenapa pelaku takut diketahui kedua orang tuanya apabila telah hamil dan melahirkan. Dari peristiwa yang terjadi selama pelaku mengandung dan juga melahirkan tidak ada seorangpun keluarga yang mengetahuinya.

- b. Pelaku kurang mendapat pengawasan dan perhatian dari orang tua

Penyebab pelaku hamil karena berpacaran dengan kekasihnya dan sering melakukan hubungan badan di Warnet Arsanet setiap kali mereka bertemu.¹¹ Dari kejadian itu peran orang tua dalam hal pengawasan dan memberikan terlihat minim, mereka kurang memperhatikan anaknya. ketika pelaku telah mengandung bayi selama 9 bulan namun tidak ada anggota keluarga baik kedua orang tua yang mengetahui anaknya sedang hamil.

¹⁰ Lihat Bab II Skripsi ini Pada Halaman 26.

¹¹ Fatmawati, Kanit IV Reskrim Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu, 25 April 2018, Pukul 09:05 WIB.

- c. Pribadi yang masih tergolong labil sehingga tidak berfikir panjang dalam bertindak

Faktor usia sangat berdampak kepada kematangan berfikir, kematangan berfikir ini menyebabkan anak yang masih tergolong labil sehingga tidak berfikir panjang dalam bertindak.

- d. Alasan Yuridis

Alasan yuridis ini berkaitan erat dengan pengetahuan pelaku yaitu anak terkait dengan pengaturan tindakan yang pelaku perbuatan. Pembuangan bayi tersebut dilakukan oleh pelaku disebabkan karena minimnya pengetahuan hukum dan agama yang dimiliki oleh pelaku, yang kemudian menyebabkan pelaku untuk berani membuang bayi yang merupakan anaknya sendiri. Pelaku hanya tahu perbuatan itu dilarang tanpa mengetahui dasar peraturannya dan ancaman yang akan menjeratnya.

3.1.2 Alasan-alasan yang Mendasari Pelaku untuk Melakukan Perbuatan Pembuangan Bayi di dukuh Kadiloyo Rt 5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangejo, Karanganyar

Pelaku pembuang bayi dalam kasus pembuangan bayi di dukuh Kadiloyo Rt 5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangejo, Karanganyar ini adalah berinisial S, yang berumur 16 tahun 8 bulan. alasan pembuangan bayi tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab antara lain yaitu:

- a. Pelaku yang menghamili

Faktor pelaku sangat berperan mempengaruhi terdorongnya pelaku untuk melakukan pembuangan bayi. Dalam hal alasan-alasan pelaku melakukan pembuangan bayi adalah tidak bertanggungjawabnya pelaku yang telah menghamilinya.

- b. Ketakutan terhadap keluarga

Takut dengan keluarga faktor keluarga terutama orang tua yang membesarkan anak tersebut sangat mempengaruhi perbuatan pembuangan bayi tersebut. Anak pasti akan takut apabila ia ketahuan oleh orang tua yang membesarkan selama ini mengetahui hamil di luar nikah. Apalagi yang mengahmili adalah orang yang sudah berkeluarga.

c. Malu kepada masyarakat

Malu kepada masyarakat hal ini merupakan dampak psikologis yang dialami oleh pelaku yang hamil di luar nikah bahkan mempunyai anak tanpa adanya seorang bapak. Mengalami kehamilan di usia muda walau bagaimanapun pasti akan menimbulkan konsekuensi yang sulit tidak saja bagi remaja yang bersangkutan, tetapi juga seluruh anggota keluarga yang lain.

d. Alasan yuridis

alasan yuridis pembuangan bayi yang dilakukan yaitu pelaku mengetahui apabila perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan agama dan peraturan hukum, terkait dengan peraturan hukum hanya sekedar tahu, dan untuk peraturan agama pelaku tahu namun tetap melakukannya karena rasa malu terhadap masyarakat, karena selama ini pelaku dikenal sebagai sosok yang baik dan merupakan remaja masjid.

3.2 Peraturan Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Pelaku Perbuatan Pembuangan Bayi

Berikut ini penulis akan menguraikan peraturan hukum pidana terkait anak sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi baik di bidang hukum materiil yaitu

3.2.1 Peraturan hukum pidana di dalam KUHP

Pasal-pasal di dalam KUHP yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pembuangan bayi yaitu sebagai berikut

a. Pasal 181 KUHP

Pasal tersebut dijelaskan barangsiapa yaitu setiap orang yang melakukan menyembunyikan kematian atau kelahiran di ancam dengan pidana penjara 9 tahun atau denda sebanyak 300 ribu rupiah. Pasal ini menjelaskan apabila setiap orang yang menyembunyikan kematian atau kelahiran, kelahiran atau kematian ini yaitu bayi dapat dijatuhi pidana

b. Pasal 305 KUHP

Pada pasal ini dijelaskan mengenai orang yang menempatkan anak yaitu yang umurnya belum 7 tahun jadi bisa dari baru lahir hingga 7 tahun yang dengan sengaja menelantarkan anak tersebut agar terlepas pertanggungjawaban terhadap anak itu dapat di ancam dengan pidana 5 tahun.

c. Pasal 308 KUHP

Dalam pasal ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari pasal 305 KUHP dimana di dalam pasal ini lebih dipertegas terkait pelaku adalah seorang ibu yang menempatkan anaknya dengan motif karena takut akan diketahui tentang kelahirannya anaknya yang bertujuan agar lepas pertanggungjawabannya dengan bayi yang di lahirkan tersebut.

d. Pasal 341 KUHP

Dalam pasal ini disebutkan apabila seorang ibu yang merasa takut karena telah melahirkan anak, kemudian membunuh anaknya.

e. Pasal 342 KUHP

Pasal ini sama seperti di dalam pasal 341 KUHP Bedanya dalam pasal ini ibu tersebut melakukannya dengan sengaja, sengaja berarti sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang dilakukannya yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya.

3.2.1 Peraturan hukum pidana di luar KUHP

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Berikut ini beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat atau dipidanakan kepada pelaku pembuangan bayi yaitu sebagai berikut

a) Pasal 76 B

Di dalam pasal tersebut menyebutkan setiap orang jadi semua orang baik itu pelakunya adalah anak atau orang dewasa yang melakukan atau menempatkan anak yaitu termasuk bayi di dalamnya dalam situasi perlakuan salah atau penelantaran. Dan selanjutnya atas perbuatan sebagaimana di atur di dalam pasal 76B ini di kenakan ketentuan pidana yang terdapat di dalam pasal 77 B yaitu setiap orang baik itu pelakunya anak atau perempuan yang melanggar pasal 76 B dapat dikenakan pidana paling lama lima tahun berserta denda seratus juta rupiah.

b) Pasal 76 C

Dalam pasal tersebut menjelaskan apabila setiap orang yakni baik orang deasa atau anak-anak tanpa suatu pengecualian yang melakukan penempatan, atau melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal tersebut bentuk kekerasan yang dilakukan berupa pengabaian, penolakan dan dapat juga berupa penyiksaan fisik, karena bayi yang pada dasarnya merupakan makhluk yang lemah dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tua namun malah ditempatkan disuatu tempat yang tidak memungkinkan anak tersebut mendapat jaminan keamanan. Untuk perbuatan yang diatur di dalam pasal 76 C tersebut diancam dengan pidana yang diatur di dalam Pasal 80.

b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berikut ini adalah beberapa pasal Pasal 128 Di dalam Pasal ini menyatakan apabila pemberian air susu eksklusif selama 6 bulan semenjak bayi itu lahir, Dalam pemberian air susu ibu tersebut semua pihak harus mendukung secara penuh, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan apabila perbuatan pembuangan bayi sama dengan merupakan perbuatan yang tidak mendukung ibu bayi secara penuh untuk memberikan air susu ibu eksklusif tidak terkecuali bahwa ibunya sendiri yang menghalang-halangi pemberian air susu ibu tersebut kepada anaknya. Dalam kaitannya ini pelaku yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 128 dapat dikenakan ketentuan pidana yang terdapat di dalam pasal 200 yaitu dalam pasal ini setiap orang yaitu semua orang baik itu dewasa, anak baik itu keluarga, pemerintah dan lain sebagaimana yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif dapat di ancam dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

Dari beberapa pasal-pasal yang telah di sebutkan diatas menurut penulis sebenarnya banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pembuangan bayi karena dalam hal ini melihat perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana,¹² namun realitasnya tidak banyak pasal yang diterapkan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri. Menurut penulis alasan tidak banyak pasal yang diterapkan para penegak

¹² Lihat Bab II Skripsi ini Pada Halaman 23-25.

hukum untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu Faktor aparat penegak hukum yaitu kemampuan polisi dalam memahami suatu fenomena perbuatan yang kemudian di tafsirkan dengan penerapan pasal tergolong rendah, karena dalam hal ini disebabkan latar belakang pendidikan polisi yang tergolong rendah. Faktor pelaku yaitu pengaruh pelaku terhadap aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pasal. Penyesuaian pasal dengan perbuatan yaitu penerapan pasal yang ada di dalam undang-undang perlu disesuaikan dengan bentuk perbuatan pembuangan bayi¹³ Jadi tidak semua pasal dalam peraturan hukum yang disebutkan di atas dapat diterapkan di seluruh perbuatan pembuangan bayi

3.3 Perlindungan terhadap Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Pembuangan Bayi dalam Proses Peradilan Pidana

Tindak pidana pembuangan bayi merupakan perbuatan yang tidak patuh kepada norma agama yang kemudian menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bersama sehingga perlu memperoleh sanksi yang bersifat memaksa.¹⁴ Berikut ini penulis akan menguraikan masing-masing perlindungan terhadap hak hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi baik melalui jalur diversi maupun peradilan umum yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Penyelesaian Kasus pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali

Penyelesaian kasus pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali dilakukan melalui proses peradilan umum. Berikut ini penulis akan uraikan mengenai penyelesaian kasus pembuangan bayi di desa Juwangi yaitu sebagai berikut

a. Alasan dilaksanakan melalui proses Peradilan umum

Terkait dengan alasan penyelesaian kasus pembuangan bayi di boyolali menggunakan proses peradilan umum adalah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyebutkan:

¹³ Lihat Bab II Skripsi ini Pada Halaman 28.

¹⁴ Herimanto dan Winarno, 2011, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.133-134.

“a. Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun

b, bukan merupakan pengulangan tindak pidana residue.”

Dalam hal kasus ini pelaku di ancam dengan Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP, 181 KUHP yang sebagaimana pasal tersebut telah di uraikan di pembahasan sebelumnya yaitu ancaman penjara untuk pasal 341 KUHP adalah 7 tahun penjara dan Pasal 342 adalah 9 tahun penjara, Pasal 181 selama 9 bulan.

b. Penjatuhan pidana dalam Putusan terhadap pelaku pembuangan bayi

Kemudian bagaimanakah proses peradilan umum ini dapat melindungi anak sebagai pelaku pembuangan bayi. Hal ini erat kaitannya dengan pidana dalam putusan yang dijatuhkan kepada pelaku dan juga proses peradilan yang dilaksanakan. Dalam proses peradilan yang berjalan akan dilakukan secara biasa hanya saja dilakukan secara tertutup tidak terbuka untuk umum. Kemudian perlindungan yang diberikan dalam proses peradilan hukum ini adalah dalam hal putusan yang dijatuhkan. Dengan pertimbangan sebagaimana di rekomendasikan dari Pihak BAPAS dan juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan juga Hal yang meringankan, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan mampu memberikan penjeratan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

c. Pelaksanaan putusan

Terkait dengan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku pembuangan bayi yaitu pelaksanaan bebas bersyarat ini yaitu setelah pelaku di bebaskan dari tahanan, Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak BAPAS untuk melakukan pengawasan selama pidana bersyarat tersebut masih berlangsung, selain itu juga melakukan koordinasi dengan orang tua anak tersebut untuk selalu melakukan pengawasan terhadap anaknya dan mendidiknya dengan baik. . Dan juga melakukan edukasi terhadap anak dan juga masyarakat agar mental anak dapat kembali dan tidak dirampas hak-haknya.

Dengan demikian dapat dikatakan putusan yang berupa pidana bersyarat tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum

yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar putusan yang diberikan lebih mencerminkan perlindungan terhadap anak dan juga hak-hak anak tidak di langgar akibat adanya putusan pemidanaan yang mengharuskan anak untuk di penjara. Sehingga tujuan pemidanaan sendiri dapat tercapai dengan baik.

3.3.2. Penyelesaian Kasus Dukuh Kadiloyo Rt.5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Terkait dengan penyelesaian kasus pembuangan bayi di Dukuh Wonosari Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dilakukan upaya Diversi.¹⁵ Berikut ini adalah uraian mengenai penyelesaian kasus pembuangan bayi di Karanganyar yaitu:

a. Alasan penggunaan Sarana Diversi

Pelaksanaa Diversi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Ssitem Peradilan Pidana anak dimana pelaku pembuangan bayi di Gondangrejo hanya diancam dengan Pasal 305 dengan ancaman pidana lima tahun sampai enam tahun, dengan demikian ancaman pidana yang dijatuhkan kurang tujuh tahun. Selain pertimbangan tersebut juga anak tersebut bukan merupakan residive, dan pelaku baru melakukan perbuatan pembuangan bayi baru pertama kali.

b. Pihak-Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi yaitu Unit PPA polres Karanganyar, Dinas Sosial Karanganyar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan KB, BAPAS Surakarta, Ketua karang taruna desa Gondangrejo, Ketua RT Gondangrejo, dan Keluarga Pelaku pembuangan bayi, Takmir masjid Gondangrejo, kepala desa Gondangrejo.

c. Hasil Diversi

Di dalam diversi tersebut dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak dan hal ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh setiap pihak yang berupa arahan dan hukuman yang bersifat sosial. Berikut ini adalah keterangan dari pihak-pihak yang menghadiri diversi tersebut:

(a) Dinas Sosial

¹⁵ Siti musrifah, Kanit IV Reskrim Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, Kamis 29 Maret 2018, Pukul 09:10 WIB

Dinas Sosial Karanganyar akan mencegah terjadinya pembuangan bayi agar tidak terulang lagi dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komisi perlindungan perempuan dan anak (KP2A), dan memprogramkan untuk terus mengadakan kegiatan sosialisasi atau pembinaan terhadap siswa-siswa SMP dan SMA Atau SMK.

(b) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan KB

Dalam melindungi pelaku pembuangan bayi memberikan pendampingan kepada pelaku dan juga mengupayakan diversi agar hak-hak anak dapat dilindungi. Selain itu, untuk mencegah kejadian itu terulang kembali, melakukan sosialisasi-sosialisasi melalui sekolah

(c) BAPAS

dilaksanakan Diversi dengan pertimbangan bahwa pelaku masih berumur 16 Tahun 8 bulan yang oleh undang undang nomer 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak masih tergolong sebagai anak. Kemudian Perbuatan pelaku tersebut di ancam dengan pidana penelantaran yang ancaman pidananya dibawah 5 tahun oleh karena itu memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi.

(d) Kepala Desa

Pihak Kepala Desa Gondangrejo memberikan keterangan apabila kejadian yang sudah terjadi agar berlalu tidak melihat kejadian yang terjadi di masa lampau.

(e) Takmir Masjid

Takmir masjid memberikan arahan agar pelaku setelah kejadian yang ada untuk kembali melakukan kegiatan yang sebelumnya rutin dilakukan tidak usah ada rasa malu atau bagaimana.

(f) Ketua Karangtaruna

Pelaku diharapkan untuk bisa aktif kembali seperti biasanya. Karang taruna menganggap kejadian tersebut sudah tidak ada lagi atau dianggap tidak pernah ada.

d. Kewajiban merawat anak

Menurut Bapak Sriyadi, Sedangkan upaya yang dilakukan Dinas sosial untuk mengupayakan pemulihan hak-hak anak yaitu merahasiakan identitas pelaku, dukungan psikologis terhadap pelaku dan mendorong agar pelaku dapat mengasuh bayinya sendiri sebagaimana mestinya. Dinas Sosial Karanganyar sebelum

menyerahkan bayi yang dibuang dan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap bayi, Dinas Sosial terlebih dahulu akan melakukan survei lokasi ke lokasi rumah pelaku dan juga orang tua pelaku, mereka mengecek kelayakan ekonomi dan tempat tinggal untuk bayi yang dibuang tersebut. dalam kasus pembuangan bayi di gondangrejo pelaku dan orang tua kandung bayi ingin tetap mengasuhnya karena telah menyesali perbuatannya.¹⁶ Dan juga menurut M. Ika Kramjaya,¹⁷ bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB, melakukan pembinaan selama percobaan selama 3 bulan terhadap pelaku baik dalam kehidupan sehari-harinya dan juga dalam hal pengasuhan bayinya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus pembuangan bayi di Gondangrejo ini menggunakan Diversi, perlindungan pelaku pembuangan bayi melalui diversi ini lebih di tekankan pada hukuman yang lebih bersifat hukuman kerja sosial agar anak (yang juga merupakan pelaku) dapat kembali ditengah-tengah masyarakat, tidak diasingkan, selain itu hak-hak anak tidak dilanggar dengan hukuman yang ada. Sehingga tujuan dari restorative justice system dapat dicapai.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *Pertama*, Terkait dengan alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali adalah pelaku takut apabila diketahui oleh kedua orang tuanya karena telah hamil dan melahirkan, Pelaku kurang mendapat pengawasan dan perhatian dari orang tua, Pribadi yang masih tergolong labil sehingga tidak berfikir panjang dalam bertindak dan juga alasan yuridis. Sedangkan, di dukuh Kadiloyo Rt 5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangejo, Karanganyar yaitu pelaku yang menghamili, Ketakutan terhadap keluarga, Malu kepada masyarakat dan juga alasan yuridis berupa kurangnya pengetahuan peraturan hukum yang berlaku atas perbuatan pembuangan bayi. *Kedua*, Terkait dengan peraturan hukum pidana terkait anak

¹⁶ Drs Sriyadim M.M, Kabid Perlinudngan dan rehabilitasi sosial kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 11:10 WIB

¹⁷ M Ika Kramjaya, Kabid PPPA Kabupaten Karanganyar, Wawancara pribadi, Karanganyar, jum;at, 30 Maret 2018, Pukul 09:10 WIB

sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi di atur di dalam peraturan hukum pidana di dalam KUHP dan Peraturan hukum pidana di luar KUHP. Dari beberapa pasal-pasal yang telah di sebutkan diatas alasan tidak banyak pasal yang diterapkan hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu faktor aparat penegak hukum, Faktor pelaku , faktor Penyesuaian pasal dengan perbuatan. *Ketiga*, Terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana dapat dilakukan melalui upaya diversi seperti praktik yang dilakukan dalam kasus pembuangan bayi di Dukuh Kadiloyo Rt.5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan penyelesaian dengan melalui proses peradilan umum seperti kasus pembuangan bayi yang terjadi di Desa Ngaren, Juwangi Boyolali.

Dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu *Pertama*, untuk pemerintah Republik Indonesia, lebih menggiatkan lagi kegiatan sosialisasi bahaya kenakalan remaja dan pergaulan bebas karena perbuatan tersebut berbahaya dan juga sangat mengancam masa depa bangsa Indonesia untuk kemudian hari. Dan mengoptimalkan peran Dinas-dinas Terkait. *Kedua*, untuk aparat penegak hukum, agar dalam mengadili anak sebagai pelaku pembuangan bayi dilakukan dengan keadilan. *Ketiga*, untuk masyarakat Indonesia, yaitu untuk orang tua pelaku pembuangan bayi agar lebih melakukan pengawasan terhadap anak- anaknya agar hal-hal yang berkaitan dengan anak dapat dikontrol oleh orang tua. Untuk anak sebagai remaja untuk menjaga pergaulannya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Untuk masyarakat umum agar dapat menerima anak sebagai pelaku pembuangan bayi di dalam masyarakat seperti biasanya.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

Keempat, Ibu Kuswadhani, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zulfa, 2009, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ISLAMICA, Vol.4 No.1, September 2009, hal.1-2, Diakses pada hari Selasa 20 Maret 2018, Pukul 18:01 WIB.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d le-, dalam Konvensi Hukum Nasional*, Semarang: Pustaka Megister.

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1.

Herimanto dan Winarno, 2011, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineck Cipta,

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Vilosa, Oriza, Polisi Tangkap Pelaku Pembuang Bayi di Hutan Juwangi, www.jatengpos.com/2013/09/penemuan-mayat-boyolali-polisi-tangkap-pelaku-pembuang-bayi-di-hutan-448485, Diakses pada hari Senin 16 April 2018, Pukul 12:00 WIB.

Wardoyo, 07 Februari 2018, *Geger Temuan Bayi Dalam Tengkok Dibuang di Gondangrejo. Diduga Baru Dilahirkan, Saat DITEMUKAN Tak Henti Meringik..*, <https://joglosemarnews.com/2018/02/geger-temuan-bayi-dalam-tengkok-dibuang-di-gondangrejo-diduga-baru-dilahirkan-saat-ditemukan-tak-henti-meringik/>. Diakses pada hari Selasa 20 Maret 2018, Pukul 19:01 WIB.